



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TIMUR BARU DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA,
KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tanggal 23 Mei 2023 Nomor KU.02.08/23/5/1/IMPT/INVS/PLND-23 Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan NPEA, sesuai Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Nomor 490/KR.04.02 dan berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan lokasi untuk pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) seluas $\pm 319.654,68 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh empat koma enam delapan meter persegi) di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Cilincing seluas $\pm 254.750,94 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan empat meter persegi); dan
- b. Kelurahan Marunda seluas $\pm 64.903,74 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga koma tujuh empat meter persegi),

sesuai peta Nomor 28/U/PR/DCKTRP/V/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2023

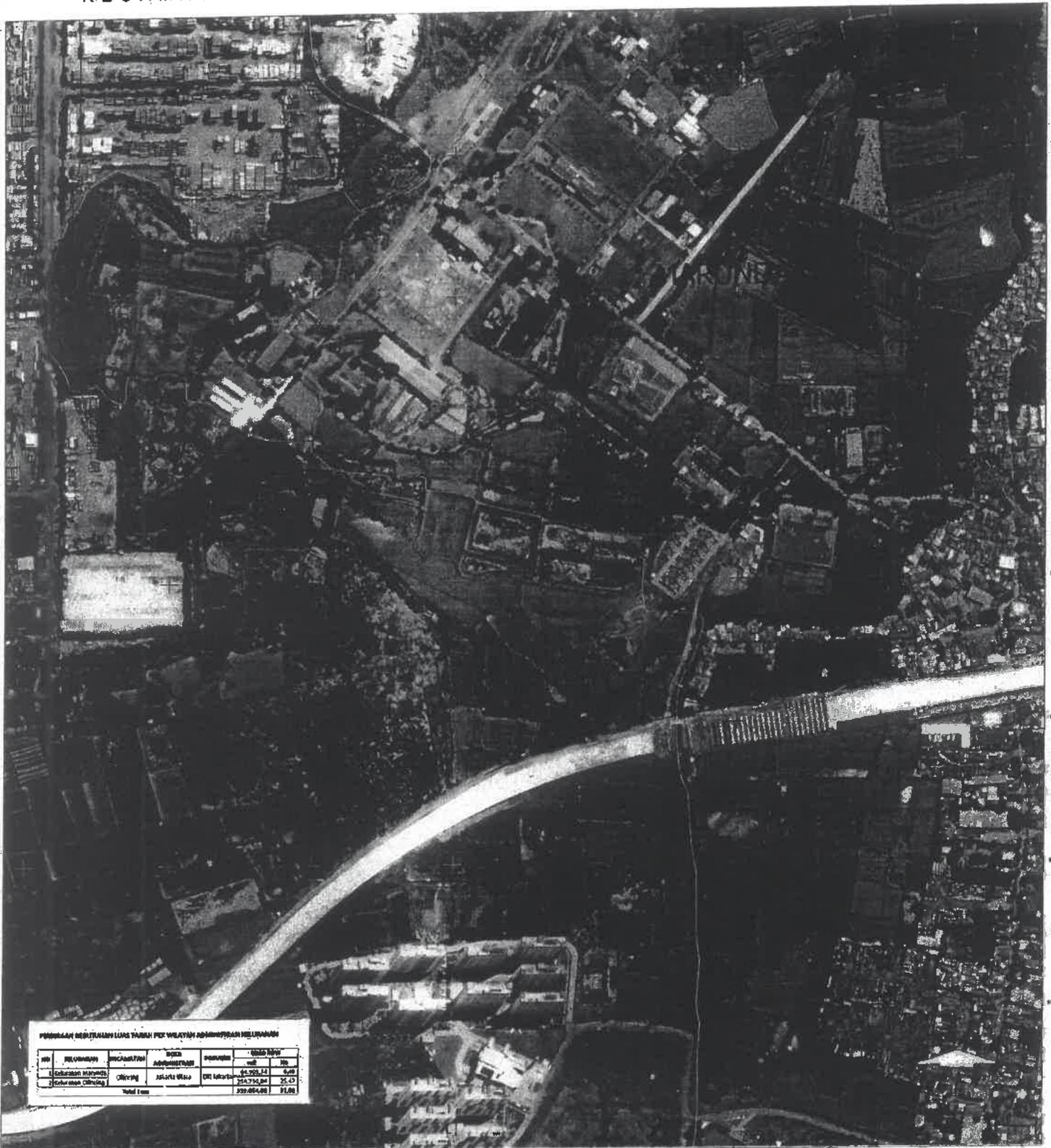


Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Perikanan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Utara
21. Camat Kecamatan Cilincing
22. Lurah Kelurahan Cilincing
23. Lurah Kelurahan Marunda

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/
NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)
DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



PERUBAHAN BERTAMBAH LUAS TANAH PER WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	KEC. ADMINISTRASI	KEC. WILAYAH	LUAS AWAL	LUAS BARU
1	Kelurahan Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	44.305,14	4,00
2	Kelurahan Cilincing	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	254.750,00	25,43
Total Luas					299.055,14	29,43

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 700.000




**PI. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**
HERU BUDI HARTONO
 KEPALA DINAS CIPTA, MITRA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 448/PMU/2023
 TANGGAL 7 Juli 2023
 NOMOR PETA 23/VI/PMU/2023
 LEMBAR KE 1 DARI 4

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR INVESTASI

BOY ROBYANTO

LEGENDA :

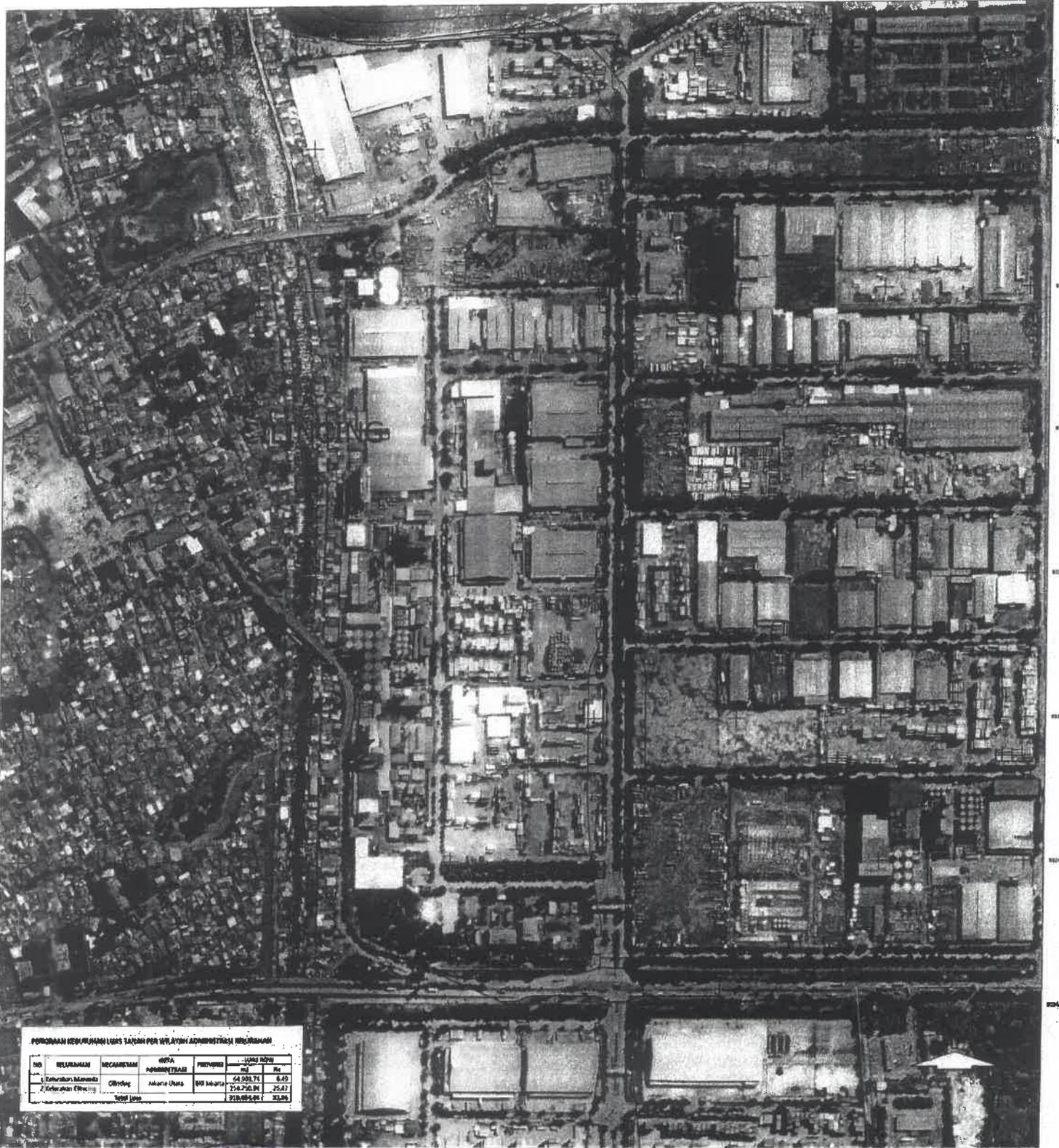
- TRACE RENCANA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KELURAHAN

METERANGAN :

1. BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELANGGARAAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) TANGGAL 23 MEI 2023 NOMOR KU.02.0023/01/PMPTAN/PS/PLNO-23 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN NPEA;
5. NOMOR URUT BIDANG TANAH DI PETA PENETAPAN LOKASI MERUPAKAN NOMOR URUT BIDANG TANAH DI DAFTAR GAMBARAN MURAM STATUS TANAH DIPPY.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/
NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)
DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



PERORANGAN KECAMATAN LOKASI TAHUN PER WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS ADMINISTRASI	PERSEK M ²	LUAS M ²
1	Kelurahan Marunda	Cilincing	64.993,71	0,49	
2	Kelurahan Cilincing	Jakarta Utara	254.750,94	25,47	
Total			319.744,65		25,96

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 700.000



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 440 TAHUN 2023
TANGGAL 3 JULI 2023
NOMOR PETA 10/UPR/DK/TRA/VI/2023
LEMBAR KE 2 DARI 4

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR INSTANSI
BOY HARTONO

LEGENDA :

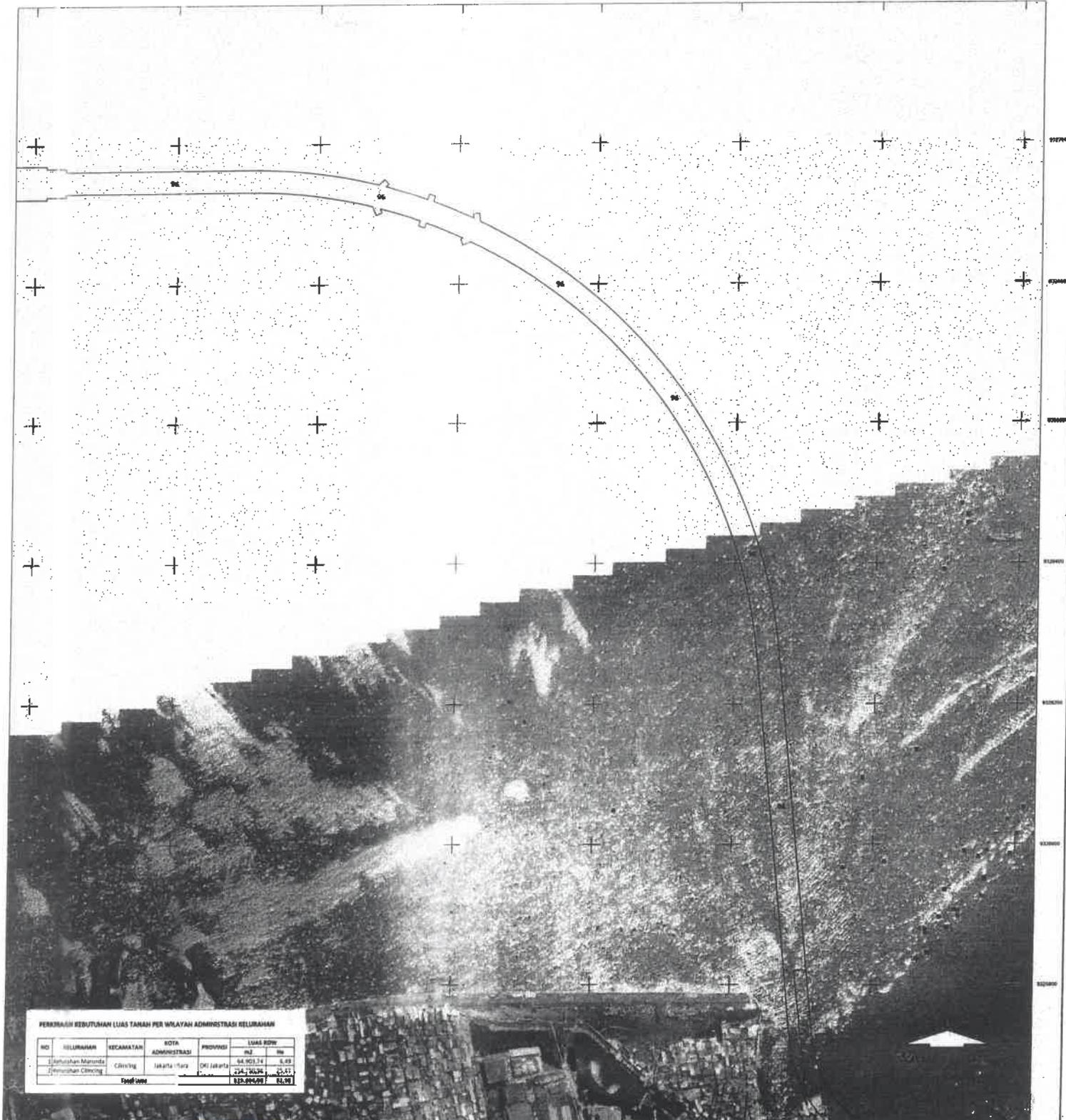
- TRACE RENCANA
- BATAS KECAMATAN
- BATAS KELURAHAN

KETERANGAN :

1. BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBAANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBAANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBAANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
4. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) TANGGAL 23 MEI 2023 NOMOR KU.02.BAG.03/1/MP/TIN/PLIND-23 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PEMBAANGUNAN NPEA;
5. NOMOR URUT BIDANG TANAH DI PETA PENETAPAN LOKASI MERUPAKAN NOMOR URUT BIDANG TANAH DI DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH DPPT.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/
NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)
DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



PERKIRAAN KEBUTUHAN LUAS TANAH PER WILAYAH ADMINISTRASI KELURAHAN

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	BOTA ADMINISTRASI	PROVINSI	LUAS RW	
					NO	LUAS
1	Kelurahan Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	54.903,74	0,88
2	Kelurahan Cilincing	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	274.763,94	25,41
Total					329.667,68	26,29

PETA KHTISAR SKALA 1 : 700.000



**PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

HERI SUDHARTONO

KAPALA DINAS GUB. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 440 Tahun 2023
 TANGGAL : 7 Juli 2023
 NOMOR PETA : 28/U/PA/DCKTR/VI/2023
 LEMBAR KE : 3 DARI 6

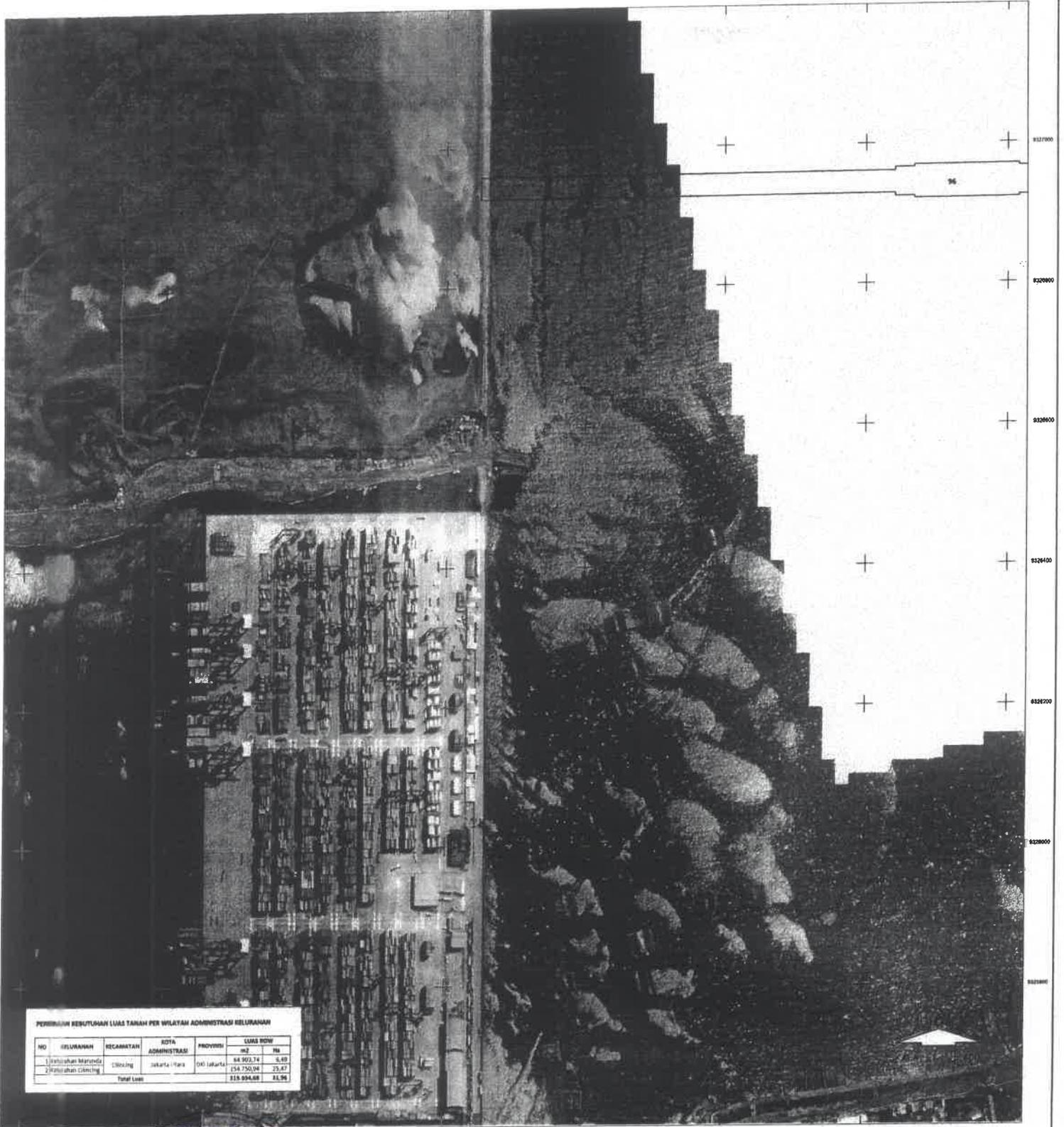
PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
 PT PELABUHAN INDONESIA PERBANGUNAN
 DIREKTUR INVESTASI

BOY ROBBIANTO

- LEGENDA :**
- TRACE RENCANA
 - BATAS KECAMATAN
 - BATAS KELURAHAN
- KETERANGAN :**
- BERDASARKAN UJ. NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERLENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERLENGGARAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR PT PELABUHAN INDONESIA (PESERO) TANGGAL 23 MEI 2023 NOMOR KU.02.02.23/1/MP/PT/IND-23 RAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN NPEA;
 - NOMOR URUT BIDANG TANAH DI PETA PENETAPAN LOKASI MERUPAKAN NOMOR URUT BIDANG TANAH DI DAFTAR GAMBARAN URUM STATUS TANAH DRPT.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN AKSES PELABUHAN TANJUNG PRIOK TIMUR BARU/
NEW PRIOK EASTERN ACCESS (NPEA)
DI KELURAHAN CILINCING DAN KELURAHAN MARUNDA
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



PERBILANGAN SEBUTANAN LUAS TANAH PER WILAYAH ADMINISTRASI SELURUHAN						
NO	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA ADMINISTRASI	PROVINSI	LUAS RUMAH	
					m ²	
1	Kelurahan Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	44.903,74	5,49
2	Kelurahan Cilincing	Cilincing	Jakarta Utara	DKI Jakarta	254.750,04	23,47
Total Luas					299.653,78	28,96

PETA KHITISAR SKALA 1 : 100.000

PL GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LEGENDA :



HEERY BUDI HARTONO
DEWAKORAS, SIPA MARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 458 TH/III/2023
TANGGAL : 7 JULI 2023
NOMOR PETA : 18/UPR/DCKTR/VI/2023
LEMBAR KE : 4 DARI 4

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TPT
PT PELABUHAN INDONESIA PERSEOROT
DIREKTUR INVESTASI

BOY ROBERTO

— TRACE PERCHANA
— BATAS KECAMATAN
— BATAS KELURAHAN

- KETERANGAN :
- BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BIDAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
 - BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN DIREKTUR PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) TANGGAL 23 MEI 2023 NOMOR RU.02.08/23/VI/MBPT/INV/PLND-23 HAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN NPEA;
 - NOMOR URUT BIDANG TANAH DI PETA PENETAPAN LOKASI MERUPAKAN NOMOR URUT BIDANG TANAH DI DAFTAR GAMBARAN URMU STATUS TANAH GPPT.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA